

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BATU (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)

Achmad Sukron¹, Yaqub Cikusin², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: sukronachmad00@gmail.com*

ABSTRAK

Salah satu program bantuan sosial yang membantu daerah berpenghasilan rendah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan bagaimana lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Batu telah dilayani oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Batu, Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai pendukung yang kuat dan juga penentang yang tangguh. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Edward III dalam Nugroho (2017), ada empat indikasi implementasi kebijakan yang baik: struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Penelitian ini berfokus pada elemen-elemen tersebut. Selanjutnya kita akan melihat variabel apa yang membantu dan apa yang menghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, (1) Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil dilaksanakan di Kota Batu untuk membantu masyarakat miskin, dengan mengikuti seluruh peraturan dan pedoman terkait. Namun terdapat beberapa data penerima yang tidak akurat pada saat pelaksanaan di lapangan sehingga menyebabkan PKH ini tidak mencapai tujuannya. Persepsi masyarakat terhadap Kebijakan PKH merosot akibat tidak kompetennya proses nominasi calon penerima PKH. (2) Alasannya antara lain memiliki staf yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung PKH di Kota Batu, dan fakta bahwa kota ini secara geografis kompak (hanya mencakup tiga kecamatan), yang membuat pengelolaan administratif dan memantau dengan mudah. Faktor lain yang menghambat efektivitas Program Keluarga Harapan adalah kenyataan bahwa program ini didasarkan pada data yang tidak akurat atau menyesatkan, sehingga memberikan pandangan negatif terhadap masyarakat. Persoalan lainnya, penerima PKH di Kota Batu memiliki kondisi karakter yang berbeda-beda sehingga menyebabkan banyak dari mereka yang lupa akan kewajibannya sebagai penerima PKH secara luas.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk yang relatif besar, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menyulitkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harus ada solusi terhadap masalah kemiskinan yang parah dan mendesak di Indonesia. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi tantangan seperti kerawanan pangan, perumahan yang tidak memadai, kondisi hidup yang tidak bersih, dan terbatasnya kebebasan sosial. Dengan kata lain, akses, pendapatan, pengeluaran subsisten, kerentanan terhadap penyakit, seringnya berhutang dan piutang, dan, dalam kasus tertentu, kebutuhan untuk menjual barang untuk hidup, semuanya merupakan variabel pendukung yang menyebabkan kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi

permasalahan kemiskinan yang rumit ini. Untuk itu, pada tanggal 21 September 2007, pemerintah menetapkan Kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk mengurangi bantuan sosial. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Pengentasan Kemiskinan mengeluarkan Keputusan Nomor 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007, yang membentuk "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" pada tanggal 21 September 2007. Panitia untuk Kerja Sama. Memperluas akses terhadap seluruh layanan merupakan tujuan PKH dalam rangka membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam sejahtera. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Sederhananya, inisiatif ini memberikan cara bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan tunai langsung ke rekening bank mereka. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk membantu daerah-daerah berpendapatan

rendah yang mempunyai komponen-komponen tersebut. Penerima Program Keluarga Harapan yang komponen dan syaratnya akan berhak menerima bantuan sosial PKH, yaitu sejenis bantuan sosial bersyarat. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar, menengah, dan menengah atas serta mereka yang terdaftar dalam program kejuruan atau teknis adalah anggota Program Keluarga Harapan, bersama dengan ibu hamil atau nifas, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak di sekolah dasar, menengah, dan tinggi. sekolah.

Program Keluarga Harapan versi Kota Batu yang dimulai pada tahun 2007 telah berjalan sejak tahun 2013 dan masih terus berjalan hingga saat ini. Kebijakan Program Keluarga Harapan telah membantu warga Kota Batu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Kota Batu. Namun menurut statistik BPS Kota Batu, jumlah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga penerima manfaat PKH di kota ini semakin bervariasi.

Namun Program Keluarga Harapan di Kota Batu kurang berjalan karena kendala lapangan. Hal *Pertama* yang harus diperhatikan adalah masih banyak masyarakat berpendapatan rendah di Kota Batu yang sangat bergantung pada bantuan sosial, berdasarkan statistik Badan Pusat Statistik tahun 2021. Keluarga di Kecamatan Bumiaji akan terus mengalami peningkatan. di klien bantuan Pakh pada tahun 2021.

Kedua, Permasalahan utama program ini adalah lambannya penyaluran dana PKH. Belum ada informasi yang jelas mengenai penyebab lamanya proses pencairan pembayaran PKH, sehingga meresahkan penerima manfaat karena lambatnya pencairan dana tunai.

Ketiga, Selain itu, Pakh dinilai tidak sejalan dengan Program Keluarga Harapan. Program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) masih diawasi oleh Kementerian Sosial, seperti diketahui. Selain itu, masih terdapat keluhan lain mengenai penerima bantuan PKH yang tidak termasuk dalam keluarga berpendapatan sangat rendah. Penulis tertarik untuk menyelidiki masalah yang ada menggunakan metodologi yang diuraikan dalam judul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)".

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana masyarakat berpendapatan rendah di Kota Batu memperoleh manfaat dari Program Keluarga Harapan?
2. di Kota Batu, apa saja faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan?

Tujuan Penelitian

1. Mempelajari dan menilai bagaimana lingkungan masyarakat berpendapatan rendah di Kota Batu telah terlayani oleh Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Menentukan faktor-faktor apa saja yang membantu atau menghambat terlaksananya Program Keluarga Harapan Kota Batu dan menganalisisnya.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kajian ini berpotensi untuk memberikan masukan teori dalam bidang kebijakan publik, pemerintahan daerah, dan pelayanan publik.
 - b. Penulis dapat mempelajari informasi ini.
- B. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan manfaat pada penulis untuk meningkat pemahaman menjelaskan permasalahan dan mengembangkan teori.
 - b. Memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Tinjauan Pustaka

Implementasi

Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam keputusan kebijakan, pemerintah harus terlibat dalam implementasi kebijakan. Sebelum menerapkan suatu kebijakan, pemerintah harus menelitinya dan memikirkan dampaknya terhadap masyarakat agar tidak menimbulkan masalah.

Untuk mewujudkan tujuan yang ditentukan oleh pilihan kebijakan sebelumnya, implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, otoritas, kelompok pemerintah, atau organisasi swasta (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2016: 195).

Indikator Implementasi Kebijakan

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, peneliti menerapkan indikator pengukuran yang berasal dari teori Edward III (2017:747). Beberapa diantaranya adalah:

1. jalur komunikasi yang terbuka antara pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang mereka bantu sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan apa pun.
2. Proses implementasi v terhadap organisasi lain, yang pada akhirnya memperlambat pelaksanaan program.
3. Faktor ketiga adalah disposisi, yaitu sifat-sifat yang terkait dengan orang-orang yang melaksanakan inisiatif kebijakan

dan program. Mentalitas seseorang merupakan salah satu komponen yang menentukan seberapa baik suatu kebijakan dijalankan.

4. Arti penting organisasi birokrasi dalam melaksanakan kebijakan ditekan dengan istilah tersebut. Proses dan struktur organisasi pelaksana merupakan dua komponen penting dari fitur ini.

Kebijakan Publik

Inti dari kebijakan publik adalah keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa pun. Meskipun tujuan kebijakan publik adalah untuk mengatasi permasalahan masyarakat secara keseluruhan, kebijakan publik sering kali dibangun dengan asumsi bahwa kerangka kebijakan yang sudah ada sudah cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut. sumber daya (brainware), perangkat lunak, database, dan sistem jaringan untuk komputer.

Kebijakan publik didefinisikan oleh Hayat (2018) sebagai pilihan luas atau strategis yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi sejumlah besar individu. Keputusan mengenai kebijakan publik, yang mempengaruhi semua orang, harus dibuat oleh pejabat terpilih yang dipilih oleh masyarakat umum untuk mewakili kepentingan mereka. Selain itu, birokrasi pemerintahan membawahi penyelenggaraan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan publik.

Kemiskinan

Koneksi atau kesulitan yang kompleks antara orang-orang yang hidup dengan lemahnya otoritas dalam keluarga, masyarakat, dan struktur sosial (negara) menjadi sumber kemiskinan, menurut Chamsyah (2008). Setiap orang mempunyai peran dalam melanggengkan dan memperburuk kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami penyebab kemiskinan. Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara miskin berdasarkan sumber daya yang tersedia di setiap wilayah. Agar lebih jelas, kita akan menyebut bangsa ini sebagai bangsa yang sedang berkembang, dan bukan sebagai bangsa yang miskin atau terbelakang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif dan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pemahaman menyeluruh dan tepat tentang apa yang terjadi di lokasi adalah tujuan dari strategi ini. Pertimbangan lebih lanjut adalah bahwa permasalahan yang diselidiki bersifat rumit dan dinamis. Dengan melakukan wawancara mendalam terhadap peserta program dan pemangku kepentingan lainnya, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih

otentik tentang bagaimana Program Keluarga Harapan Kota Batu mengatasi kemiskinan.

Fokus Penelitian

Dengan tujuan sebagai berikut, penelitian ini mengkaji BKPSDM Kota Malang:

1. Dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan yang dijabarkan oleh Edward III dalam Nugroho (2017:747), Masyarakat berpendapatan rendah di Kota Batu bisa mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrat
2. pihak yang membantu dan pihak yang merugikan Program Keluarga Harapan Kota Batu.

Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Kota Batu, Diantara Balai Kota Tani, Gedung B Lantai 2, menjadi lokasi penyelidikan ini.

Sumber Data

Untuk penelitian ini, kami berkonsultasi dengan database berikut:

1. informasi langsung. Wawancara dan observasi langsung dilakukan terhadap berbagai pejabat BKPSDM Kota Malang antara lain Kepala Subbagian Perencanaan dan Program, Keluarga Penerima Manfaat PKH, Pendamping Desa PKH, dan Koordinator PKH Kota Batu, untuk mengumpulkan data-data utama yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Data Diambil dari Sumber Sekunder. Artikel jurnal, buku, pedoman, undang-undang, dan situs web pemerintah adalah beberapa bahan sekunder yang digunakan untuk penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Strategi berikut digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

1. Menonton (menonton). Untuk mengumpulkan bukti penelitian, pengamat mengamati bagaimana administrasi kepegawaian didukung oleh SIMAS melalui pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian.
2. Melakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hybrid, yang menggabungkan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diprogram menjadi panduan wawancara mengenai penggunaan SIMAS untuk keperluan pemutakhiran data pegawai di BKPSDM Kota Malang, sedangkan yang kedua lebih bersifat terbuka.
3. Data yang dikumpulkan meliputi foto dan rekaman audio wawancara, sedangkan literatur

yang berkaitan dengan website Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional (SIMAS) menjadi referensi dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Berikut prosedur analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019:321):

1. Meminimalkan Data. Data yang dikumpulkan dari Dinas Sosial Kota Batu direduksi dan disederhanakan oleh peneliti sehingga mendukung skripsi penelitian.
2. Tampilan Data. Representasi visual hubungan antar kategori, teks deskriptif, diagram alur, dan diagram merupakan bagian dari penyajian data kualitatif.
3. Menarik kesimpulan. Dengan menggunakan data yang terverifikasi, para peneliti dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak pada lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Batu.

Keabsahan Data

Verifikasi keabsahan data dalam pendekatan kualitatif melibatkan evaluasi keterpercayaan, keteralihan, keterandalan, dan kekonfirmasian (Sugiyono, 2019: 364). Data penelitian ini diuji keabsahannya dengan cara:

1. Membangun Keterpercayaan. Metode termasuk melakukan analisis kasus negatif, meningkatkan observasi, melakukan triangulasi data, berbicara dengan rekan kerja, dan menjaga kesinambungan penelitian digunakan untuk menjamin kredibilitas penelitian. Selain itu, observasi dan analisis yang cermat memastikan bahwa data penelitian kualitatif dapat dipercaya dan dapat diandalkan.
2. Selanjutnya kita melakukan uji konfirmabilitas. Uji kepastian penting untuk menjadikan penelitian kualitatif lebih obyektif karena subjektivitas yang melekat di dalamnya. Beberapa individu yang membuktikan objektivitas penelitian harus sepakat sebelum tes konfirmasi dapat dilakukan secara bersamaan.

Pembahasan

1. Bekerjasama dengan masyarakat berpendapatan rendah di Kota Batu melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Nugroho (2017:747) menguraikan teori implementasi kebijakan Edward III yang coba digunakan oleh para akademisi di Kota Batu untuk menganalisis penanganan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat miskin perkotaan. Mereka fokus pada empat bidang utama: komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian berdasarkan wawancara lapangan dengan menggunakan indikator efikasi menghasilkan temuan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi yang terbuka dan jujur antara mereka yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut dan orang-orang yang ingin mereka bantu. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, sangat penting bagi mereka yang ditugaskan untuk mencapai tujuan kebijakan untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai ukuran dan tujuan kebijakan. Taktik sosialisasi, teknik kegiatan P2K2, dan kontak antar aktor semuanya menjadi bagian dari proses komunikasi dalam pelaksanaan PKH Kota Batu.

Hingga saat ini, Dinas Sosial dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Malang telah berhasil mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat dan melibatkan seluruh pihak yang terlibat. Pada pertemuan pertama, rincian calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) disampaikan kepada pelaksana, yang kemudian memberikan informasi terkait PKH.

Selain taktik sosialisasi, pelaksana Program Keluarga Harapan juga menggunakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) untuk melakukan strategi komunikasi. Kegiatan P2K2 merupakan tugas yang wajib dilakukan oleh KPM PKH. Metode pembelajaran yang sistematis untuk mempercepat perubahan perilaku pada KPM PKH, kegiatan P2K2 diuraikan dalam pedoman pelaksanaan PKH tahun 2021. Pendidikan, Kesehatan, Pengelolaan Keuangan, Pola Asuh, dan Kesejahteraan Sosial Keluarga merupakan bagian dari kurikulum P2K2 yang wajib diajarkan oleh Pendamping PKH kepada seluruh KPM PKH.

Taktik ketiga adalah peserta Program Keluarga Harapan saling berbicara satu sama lain. Berbagai pihak berperan dalam hal ini, termasuk pemerintah federal, Kementerian Sosial Indonesia, berbagai kepala dinas, koordinator dan fasilitator PKH Kota Batu, serta kabupaten, desa, kelurahan, puskesmas, dan lembaga pendidikan. Hal ini merupakan hal yang lumrah untuk mempertahankan program Keluarga Harapan di Kota Batu. Selain itu, penilaian dan rapat koordinasi dilakukan setiap bulan

untuk memfasilitasi komunikasi antar aktor.

b. Sumberdaya

Pengelolaan sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan Program Keluarga Harapan Kota Batu patut diacungi jempol dalam hal ini. Lima belas orang berperan sebagai pendamping PKH desa dan satu orang berperan sebagai koordinator PKH kota dalam pelaksanaan PKH Kota Batu. Pendidikan dan pelatihan bersifat wajib bagi seluruh sumber daya manusia, termasuk koordinator dan pendamping PKH.

Temuan studi lapangan menunjukkan bahwa pendamping khususnya merupakan sumber daya manusia yang sangat kompeten dalam memberikan materi kegiatan P2K2. Kesehatan, khususnya kebutuhan gizi seimbang, merupakan tema sentral dalam program P2K2 pada periode tersebut. Kemampuan untuk mendekatkan orang juga cukup terlihat. Peneliti menemukan bahwa dalam kegiatan P2K2 KPM dan Pendamping PKH melakukan kegiatan peningkatan kreativitas melalui kegiatan memasak, selain mendapatkan bekal. Keikutsertaan dalam kegiatan ini akan membantu KPM PKH mendapatkan kepercayaan diri, belajar bekerja sendiri, dan mengembangkan pola pikir kewirausahaan.

c. Disposisi

Orang-orang yang melaksanakan kebijakan dan program sering kali menunjukkan ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan wataknya. Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kota Batu masih dinilai kurang profesional dalam menjalankan programnya. Hal ini ditemukan pada saat penelitian lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara. Hal ini membuktikan bahwa Program Keluarga Harapan dilaksanakan di lapangan dengan adanya campur tangan politik dan kepentingan individu yang memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan kurangnya profesionalisme yang ditunjukkan oleh pelaksana Program Keluarga Harapan.

Saat wawancara, peneliti juga memverifikasi situasi tersebut dengan salah satu pendamping PKH yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Kali ini narasumber kembali menegaskan apa yang telah mereka sampaikan sebelumnya: bahwa kejadian seperti itu memang terjadi di lapangan, dan pihak yang bertanggung

jawab atas kejadian tersebut hanya bertindak demi kepentingannya sendiri. Orang-orang ini membuka jalan bagi orang-orang terdekatnya, yaitu teman, keluarga, dan tetangga untuk dicalonkan sebagai penerima PKH.

d. Struktur Birokrat

Bagian penting dalam melaksanakan kebijakan adalah kerangka birokrasi, yang disinggung dalam istilah tersebut. Proses dan struktur organisasi pelaksana merupakan dua komponen penting dari fitur ini. Kunci keberhasilan pelaksanaan PKH adalah pembagian beban kerja yang baik, dalam hal ini Program Keluarga Harapan di Kota Batu. Tugas telah ditetapkan dengan jelas, dan penugasan telah dilakukan sesuai kompetensi. Struktur organisasi pelaksana PKH Program Keluarga Harapan Kota Batu terlihat pada gambar tabel pada halaman temuan penelitian di atas. Setiap bangunan memiliki tujuan yang unik. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan di Kota Batu dapat disusun dan dipraktikkan di lapangan dengan lebih efisien.

1. faktor-faktor yang membantu atau merugikan masyarakat berpendapatan rendah di Kota Batu dalam upaya melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

a. Faktor Pendukung

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mungkin terselenggara tanpa adanya komponen pendukung. Dalam mendukung Program Keluarga Harapan terdapat satu aspek yaitu sebagai berikut: data kepegawaian yang akurat.

- 1) Memanfaatkan sumber daya manusia yang berkompeten, penguasaan materi pelajaran dan kemampuan memberikan pelayanan prima kepada KPM ditunjukkan dalam setiap kegiatan P2K2.
- 2) Memiliki prasarana dan sarana yang memadai. Prasarana dan prasarana Program Keluarga Harapan merupakan bentuk bantuan yang membantu kelancaran program.
- 3) Faktor geografis yang penting. Profitabilitas tinggi karena administrasi, pemantauan, dan pengelolaan menjadi lebih mudah di Kota Batu, sebuah kota kecil yang hanya memiliki tiga kecamatan.

b. Faktor Penghambat

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan suatu kebijakan merupakan bagian integral dari proses tersebut, sama

seperti komponen pendukung lainnya. Berikut beberapa contoh data yang salah dan karakter KPM yang berbeda:

1) Karakter KPM

Menghadapi banyaknya kepribadian KPM menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan. Khususnya bagi kelompok lanjut usia, sebagian besar KPM tidak mengingat tanggung jawab penting, seperti menghadiri acara P2K2.

2) Data yang tidak valid

Apabila Program Keluarga Harapan dilaksanakan di Kota Batu, Kepala Desa atau Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan politik di desa dapat mengusulkan penerima PKH melalui RT/RW. Seperti yang biasa terjadi di bidang ini, gambaran masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan masih kurang karena program ini terus membantu masyarakat yang dianggap mampu secara finansial.

Kesimpulan

Peneliti di Kota Batu mengkaji pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan menggunakan indikator teoritis implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Nugroho (2017:747). Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan di Kota Batu dengan mematuhi seluruh peraturan, protokol, dan standar yang berlaku, berdasarkan kajian dan observasi. Cara yang baik untuk memulainya adalah dengan menciptakan saluran komunikasi yang sukses, seperti sosialisasi, strategi kegiatan P2K2, dan komunikasi antar aktor. Selain itu, sumber daya teratas ditunjukkan oleh indikator sumber daya, yang merupakan hasil langsung dari partisipasi rutin mereka dalam program pelatihan dan pendidikan. Sama halnya dengan program yang dijalankan pemerintah lainnya, Program Keluarga Harapan Kota Batu juga mengikuti protokol dan protokol yang telah ditetapkan. Namun, masyarakat mempunyai kesan kurang baik terhadap PKH karena praktik nominasi program yang keliru dan kurangnya profesionalisme yang ditunjukkan oleh pelaksana program.

Saran

Berdasarkan hasil tersebut, para peneliti di Kota Batu menyarankan perubahan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

1. Mendorong peserta PKH untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaannya melalui kegiatan P2K2 merupakan salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan membantu mereka menjadi mandiri, sehingga mengurangi

ketergantungan mereka pada bantuan pemerintah.

2. Untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan prima, perlu dilakukan pengecekan lapangan secara berkala baik terhadap nasabah PKH maupun bank mitra. Pemeriksaan ini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi dan tindak lanjut.
3. Untuk memastikan Program Keluarga Harapan menghasilkan uang, perlu dilakukan peninjauan berkala terhadap pemutakhiran data peserta PKH. Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan situasi sosial dan ekonomi di lapangan.
4. Agar Program Keluarga Harapan tetap berjalan sesuai rencana, maka penting bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama yang berada di lapisan paling bawah, seperti Pemerintah Desa, untuk bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam mengajukan pendataan calon penerima PKH. Hal ini akan membantu menghindari persepsi negatif di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya Edisi Pertama. Jakarta : Cetakan Pertama, Prenada Media.
- Badan Pusat Statistika . 2023. Kota Batu Dalam Angka Tahun 2023. <https://batukota.bps.go.id>
- Chamsyah B. 2008. Reinventing Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Trisakti University Press
- Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.ELEX Media Komputindo.
- Hayat. 2018 . Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi dan Formulasi . Malang : Empatdua Media
- Moloeng, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Suharto, E. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Jurnal**
- Anggiana, Anggiana, Yaqub Cikusin, and Agus Zainal Abidin. "PROBLEMATIKA DISTRIBUSI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)(Studi Kasus Di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur)." *Respon Publik* 17.10 (2023): 1-8.
- Abu Huraerah. *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, 2013. Diakses 15 februari 2023.
- Edu, Eduardus, and Abd Rohman. "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8.3 (2019): 67-74.
- Fitriani, Aida Nur, Hayat Hayat, and Retno Wulan Sekarsari. "KONTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 15.01 (2023): 225-243.
- Jayaputra, A. (2014). *Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya Berbasis Institusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat*.
- Karuru, P. (2013). *Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian*. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1-9.
- Kalsum, Umi, Nurul Umiati, and Hayat Hayat. "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)." *Respon Publik* 13.6 (2019): 70-76.
- Laili, Fauziyah Nur, Retno Wulan Sekarsari, and Taufiq Rahman Ilyas. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RANCANG BANGUN BUS PADA TRANSPORTASI PUBLIK DI TERMINAL ARJOSARI." *Respon Publik* 17.11 (2023): 45-54.
- Lestari, Rani . (2018) . Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). (Skripsi, Universitas Brawijaya)
- Hidayati, Maulidia, Yaqub Cikusin, and Retno Wulan Sekarsari. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA TOGUBANG DAN DESA TEGAR PRIYAH KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN." *Respon Publik* 18.1 (2024): 1-10.
- M. Shofi, Sugeng Rusmiwari . (2019). *Proses Pelayanan E-Ktp Dalam Usaha Tertib Administrasi Kependudukan Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan (Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8 No. 1
- Nasikun. *Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2001.
- Izza, Nelly Nurul, Afifuddin Afifuddin, and Suyeno Suyeno. "Strategi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)." *Respon Publik* 15.5 (2021): 16-22.
- Rahmanda, Citra. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 13, No. 5.
- Suharto, Edi dan Thamrin, Djuni. 2012. *Program Keluarga Harapan:Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa*. Jakarta:Aspirasi Vol.3 No. 1.
- Sumodiningrat, Gunawan. "Jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat." *Journal of Indonesian Economy and Business* 14.3 (1999).
- Sasmito, Cahyo, and Ertien Rining Nawangsari. "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 3.2 (2019): 68-74.

Ulumiyah, I. (2013). *Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Undang- Undang/Peraturan

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021.

Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa

Website

Annisa. 2023. Sudah Terima Bantuan ? Ini Sebab Dana Bansos PKH 2023 Tak Kunjung Cair, Segera Cek. <https://betv.disway.id/read/21363/sudah-terima-bantuan-ternyata-ini-sebab-bansos-pkh-tahap-3-2023-tak-kunjung-cair-segera-cek> (Diakses Pada 12 Agustus 2023)

Badan Pusat Statistika . Data Kemiskinan Di Kota Batu Tahun 2022 . <https://batukota.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/45/profil-kemiskinan-kota-batu-2022.html>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) . Bansos PKH 2023 . <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=ce43b29-1d2a-4fdb-999e-6df3fc983d7b>

Bayu, Dimas J. 2020. Hasil Studi : PKH dan Bantuan Sembako Tak Tepat Sasaran Terganjal Data. <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5f1154c4a509b/hasil-studi-pkh-dan-bantuan-sembako-tak-tepat-sasaran-terganjal-data> . (diakses pada 17 Juli 2020)

Mulyono. 2009. Model Implementasi Kebijakan George Edward III. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> . (Diakses Pada 10 Oktober 2023)

Pemerintah Kota Batu . 2024. <https://batu.go.id> . (Diakses Pada 3 Januari 2024)

Yahya Achmad N. & Kuwado Febian Kuwado . 2020. Distribusi Bansos PKH Tak Tepat Sasaran Baru. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/11523711/distribusi-bansos-pkh-tak-tepat-sasaran-mensos-siapkan-aturan-baru> . (Diakses Pada 04 Juni 2020)